

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PROGRAM NUKLIR IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN BARACK
OBAMA**

ABSTRACT

This thesis is written by containing an explanation related to the foreign policy of United States under Barack Obama towards Iran's nuclear program. Obama's foreign policy by viewing from the advantages and disadvantages of the outcome. Theoretical frameworks used by this thesis to analyze the problem are Foreign Policy Analysis, Rational Choice theory and model of Rational Actor in analyzing US foreign policy towards Iran's nuclear program. Under two different leaders, President George W. Bush and, then, Barack Obama, the result of this research shows that in policy related to Iran's nuclear program made by Bush and Obama, there are differences. The differences laid down on the decision which is preferred to the options taken by the leader to direct his foreign policy. In this case, Bush intends to confrontation approach by using 'hard power identical' threat—such as military force, while Obama put more efforts in diplomacy or soft power approach. In this research, it is proven that the differences caused by individual factor and leadership characteristics as rational actors. The findings of this research that are Obama wants to protect the achievement of political advantages, defends security in Middle East and keeps US economic advantages and its allies in hand.

Keywords: *foreign policy, nuclear, soft power, Iran, United States.*

PENDAHULUAN

Politik luar negeri suatu Negara merupakan perpaduan dan refleksi dari perkembangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh situasi regional maupun internasional. Begitu juga politik luar negeri Amerika Serikat (AS) yang tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain, letak geografis, sumber daya dan nilai strategis yang dimiliki oleh negara adidaya tersebut, tentu mempengaruhi sikap, cara pandang, dan cara bangsa ini dalam memposisikan diri di dalam pergaulan antar-bangsa.

Mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran, secara historis, bahwa hubungan Amerika Serikat dan Iran diawali dengan sebuah hubungan diplomatik yang mesra. Amerika Serikat dan Iran resmi memulai hubungan kenegaraan pada akhir tahun 1800 ketika Raja Nasser Al-Din Shah mengirim duta besarnya ke Washington. Demi menyelamatkan keuangan kerajaan Iran yang mengalami krisis, Amerika juga pada tahun 1911 mengirim Morgan Shuster, seorang Bankir Niaga Amerika ke Iran, dan seorang penasihat ekonomi Arthur Chester Millspaugh, memimpin keuangan kerajaan di Iran. Dibawah tangan Shuster dan Millspaugh keuangan Iran berkembang pesat, ekonomi Iran mulai terbangun dan Iran mulai menjalin hubungan perdagangan dengan Barat.

Sejak saat itu hingga pecah Perang Dunia II, Hubungan kedua Negara tetap terjalin dengan baik. Undang-Undang yang berlaku di Iran banyak dibuat berdasarkan kesepakatan dari Amerika Serikat. Iran memosisikan Amerika Serikat sebagai “kekuatan ketiga” dalam perjuangan membebaskan diri dari dominasi Inggris dan Rusia.

Amerika Serikat bersama Pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlevi telah membawa kebangkitan perekonomian Iran karena dukungan dana yang besar dari Amerika dan sikap Reza Shah yang sangat pro-Israel. Bahkan Reza Shah sempat menjadi Kaisar minyak dunia banyak melakukan infestasi di luar negeri. Reza Shah bahkan berambisi ingin menjadikan Iran sejajar dengan Britania Inggris dan Amerika Serikat. Di Rezim ini pula Amerika bersama sekutunya mendukung program pengayaan nuklir Iran, dengan tujuan tenaga listrik Iran tercukupi dan minyak bisa tereksploitasi lebih besar. Amerika menandatangani kesepakatan perjanjian memasok uranium selama 10 tahun dengan Iran (Zubaeda Malik:2013). Sementara Prancis memberikan bantuan berupa sumber daya manusia dan Inggris berupa pendanaan.

Namun, Sejak revolusi para Mullah dibawah pimpinan Ayatullah Khoemenei pada tahun 1979 yang menumbangkan sekutu Amerika yaitu, Presiden Iran Muhammad Reza Pahlevi. Terjadi pendudukan Kedutaan Amerika di Teheran oleh para aktivis mahasiswa pada 4 November 1979 yang diikuti penyanderaan 52 orang diplomatnya selama 444 hari, merupakan peristiwa yang memalukan Amerika dan cukup menjadi alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik pada 7 April 1980. Selanjutnya, dengan dalih HAM dan Demokrasi Amerika gencar menjatuhkan berbagai embargo, operasi intelijen dan operasi militer (Bambang Cipto:2014).

Kebijakan Nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu pemicu tekanan Barat melalui Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Republik Islam tersebut. Mereka menilai

bahwa tujuan Iran untuk mengadakan pengayaan uranium tidak lain adalah demi kepentingan militernya agar mampu hadir sebagai kekuatan dominan di Kawasan Timur Tengah dalam menandingi salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat dan Israel. Iran sendiri secara resmi berulang kali menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan itu dan mengatakan bahwa program pengayaan uranium mereka betul-betul demi tujuan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membantu memenuhi kebutuhan energi nasionalnya di masa depan.

Namun, kebijakan untuk tetap melanjutkan program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran membuat negara tersebut mendapat banyak tekanan. Penentangan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap keputusan Iran terus mewarnai dinamika politik negara itu. Iran terlanjur dicap sebagai kekuatan “ekstrimis” dalam sistem Kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Iran kemudian digambarkan sebagai sebuah ancaman yang berbahaya bagi keamanan global serta kestabilan Kawasan Timur Tengah yang memang sudah begitu rapuh. Tentu saja hal ini juga akan mengganggu kepentingan dan kehadiran Amerika Serikat sebagai negara adidaya di kawasan tersebut. Amerika Serikat memperingatkan bahwa program nuklir Iran adalah titik awal dari niat Iran untuk membangun persenjataan nuklir. Melalui organisasi dan forum internasional, seperti halnya PBB dan IAEA, Amerika dan sekutunya terus menebarkan ketakutan publik terhadap potensi nuklir Iran. Amerika Serikat bahkan membuat istilah “Iranian Threat” khusus untuk mendeskripsikan ancaman yang akan datang dari proyek nuklir yang sedang dijalankan Iran. Perlu diketahui pula bahwa Iran sendiri adalah salah satu dari 191 negara di dunia yang telah bersedia menandatangani Non-Proliferation Treaty (NPT) dan kebijakan pemerintah Iran dalam penerapan teknologi nuklir termasuk upaya pengayaan uranium untuk tujuan damai adalah sebuah hak yang dijamin dalam perjanjian tersebut.

Berbagai cara dan tekanan dilakukan agar Iran berubah pikiran dan bersedia menghentikan kebijakan kontroversialnya tersebut, termasuk hingga membawa perkara ini ke Dewan Keamanan PBB yang akhirnya menjatuhkan beberapa sanksi dikarenakan Iran terus melanjutkan program nuklirnya. Namun berbagai macam embargo dan sanksi internasional yang dijatuhkan pada Iran tidak membuat negara itu lantas menyerah begitu saja terhadap tuntutan itu dan justru mereka tetap bersikap teguh serta berkali-kali menegaskan bahwa mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah hak dan Iran bukan pengecualian.

Iran kemudian mengambil jalan diplomasi sebagai solusi untuk mengatasi keadaan sulit ini. Melalui kebijakan luar negerinya, Iran berusaha memainkan peranan strategis dengan

mendekati dan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang cenderung tidak sepaham dengan Amerika Serikat dan sekutunya, seperti halnya Rusia dan China. Kedua negara ini bahkan bersedia membantu Iran terkait transfer teknologi nuklir yang sangat mereka butuhkan. Selain itu, demi mendapat dukungan internasional, Iran juga memalingkan dirinya kepada negara-negara yang memiliki populasi muslim yang besar dan bekerja sama dengan mereka. Kepemilikan sumber daya alam Iran, terutama pada sektor minyak bumi dan gas alam menjadi salah satu nilai plus bagi Iran, dalam posisi tawar menjalin hubungan antar-bangsa. Iran merupakan salah satu negara di Kawasan Timur Tengah yang termasuk sebagai negara yang mandiri dan anti terhadap intervensi dari asing, terutama dari Amerika Serikat. Kekayaan Iran yang berupa minyak dan gas alam dijadikan sebagai salah satu Bargaining Power yang ampuh.

Amerika Serikat pada tahun 2009, terjadi pergantian kepemimpinan dari George Walker Bush kepada Barack Obama, Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang baru pertama kali terjadi dikarenakan untuk pertama kalinya kandidat Presiden Amerika Serikat yang berasal dari kulit hitam mampu memenangkan pemilihan umum, Presiden George Walker Bush merupakan Presiden yang berasal dari Partai Republik sedangkan Presiden Barack Obama berasal dari Partai Demokrat, Untuk itu sudah pasti kebijakan yang diambil berbeda. Kebijakan Presiden George Walker Bush terkenal dengan mengedepankan militeristik, sedangkan Presiden Barack Obama lebih mengedepankan diplomasi. (Rifqi Muna: 2009).

Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat mendapat banyak sambutan positif dan dukungan dari masyarakat dunia, khususnya Kawasan Timur Tengah, masyarakat dunia berharap dengan terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden, bisa membawa perubahan pada kebijakan politik luar negeri AS. Mereka berharap tidak ada lagi penjajahan Amerika terhadap negara lain. Hal tersebut bisa kita lihat dari perbedaan gaya kepemimpinan antara George Walker Bush dan Obama terhadap keputusan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran.

Adapun perbedaan kepemimpinan antara George Walker Bush dan Barack Obama, misalnya, Amerika Serikat pada Rezim George Walker Bush melakukan intervensi terhadap penelitian uranium bersama Badan Intelijen Amerika Serikat (National Intelligence Estimate), IAEA (International Atomic Energy Agency) dan anggota peneliti dari pihak partai politik konservatif pada tahun 2007. NIE menemukan beberapa uranium dan pengembangan energi nuklir dari hasil penelitian dan pemeriksaan. (Oren, 2012:660).

Selain itu, Amerika dibawah pemerintahan George W Bush juga memberi ancaman dan deretan sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran, Washington berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer terhadap negara Iran apabila tidak mau bekerjasama terkait dengan program nuklirnya. Disisi lain, pihak Iran sendiri menyatakan tidak akan mundur dari program seperti pengembangan nuklirnya dengan mengatasnamakan hak nasional bangsa Iran. Ditambah lagi dalam pandangan Amerika Serikat bahwa negara Iran dinilai tidak transparan dalam proses investigasi dan ditemukan melanggar kesepakatan yang termuat dalam NPT pada tahun 2005. Setahun kemudian, secara mengejutkan Presiden Iran periode 2005-2013 Mahmoud Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah berhasil memperkaya uranium menjadi 3,5 persen U-235 dengan menggunakan 164 sentrifugal dan mengklaim bahwa Iran telah bergabung dengan grup negara yang memiliki teknologi nuklir. Hal ini membuat Iran dijatuhi berbagai resolusi sanksi dari Dewan Keamanan PBB yang dimotori oleh Amerika Serikat. Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Iran telah dikenakan sebanyak 4 resolusi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aktifitas nuklirnya untuk sementara, dan juga dalam bentuk sanksi ekonomi. (Alam Abtaf:2011).

Hal lain yang menunjukkan bahwa kepemimpinan George W Bush sangat keras terhadap Iran, dibuktikan ketika George W Bush menyampaikan pidato dalam menyelesaikan konflik dengan Iran bahwa : “Radical Shia elements some supported by Iran, formed death squads. And the result was a vicious cycle of sectarian violence that continues today. The consequences of failure are clear: Radical Islamic extremists would grow in strength and gain new recruits. They would be in a better position to topple moderate governments, create chaos in the region, and use oil revenues to fund their ambitions. Iran would be emboldened in its pursuit of nuclear weapons” (Pidato George W Bush: 10 Januari 2007).

Dari pidato tersebut dapat dilihat bahwa Amerika dibawah kepemimpinan George Walker Bush mencurigai kekuatan politik Islam di Iran sebagai hal yang dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional dan Iran menjadikan minyak sebagai alat untuk memenuhi ambisi mereka, salah satunya adalah dengan pengembangan program nuklir. Amerika Serikat menganggap apabila Negara Iran dibiarkan untuk mengembangkan nuklir, walaupun bukan digunakan sebagai tujuan persenjataan. Amerika Serikat tetap beranggapan bahwa akan terjadi dampak besar bila Iran dibiarkan mengembangkan program nuklir yaitu :

1. Negara, di Kawasan Teluk (Saudi Arabia, Mesir, Suriah, dan Turki) akan mengikuti langkah Iran sehingga akan terjadi perlombaan senjata.
2. Iran akan memanipulasi harga minyak dunia.
3. Akan meningkatnya terorisme di Kawasan Timur Tengah, dengan tujuan utama adalah Amerika Serikat, Israel, dan Eropa.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W Bush ini juga mengatakan bahwa Negara Iran adalah salah satu dari "The axis of evil". Selain itu, Bush juga menggunakan diplomasi Koersif terhadap Program Nuklir Iran". Diplomasi koersif" adalah negosiasi yang memerlukan sanksi agar aktor yang dikehendaki mau mengerjakan yang diperintahkan oleh negara coercer. Perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan Koersif diplomasi adalah stick and carrot yaitu apabila negara yang dituju mengikuti maka mereka boleh mendapatkan wortel, Namun jika sebaliknya, jika tidak mengikuti maka negara tersebut akan dipukul dengan tongkat.

Strategi seperti inilah yang digunakan Oleh George W Bush. Akan tetapi, Sebelum jenis diplomasi ini diterapkan maka pemerintahan George W Bush memulai langkah dengan mengkonstruksi pola pikir dunia internasional yang di anggap akan berbahaya jika dibawa oleh Iran. Konstruksi ini terutama dituju untuk Negara-Negara besar Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman. Inilah yang terjadi jika Negara Amerika Serikat berhasil meyakinkan ketiga negara tersebut. Pada bulan Oktober 2003, terdapat tiga negara besar Uni Eropa yang berhasil membuat Iran setuju untuk mengikuti protocol IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk dapat menunda pengayaan tersebut. (Hadley, 2014).

Memasuki masa Pemerintahan Barack Obama, Beliau hadir dengan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi isu nuklir Iran saat berhadapan dengan pemimpin Iran yang lebih moderat. Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama mencoba untuk menggunakan pendekatan yang Soft Diplomasi dengan merubah haluan Negara-Negara yang selama ini menjadi "musuh" pada Negara Amerika Serikat.

Untuk alasan meninggalkan warisan kepemimpinan pada periode kedua kepemimpinannya, Barack Obama memberi tugas khusus kepada John Kerry untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Negara-Negara yang selama ini menutup pintu diplomatik dengan Amerika Serikat. Khususnya untuk Iran, isu yang muncul di depan adalah kepemilikan nuklir dan

embargo bidang ekonomi yang membuat Iran tidak bisa berbuat banyak dalam panggung perdagangan internasional.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan sinyal perubahan terkait kebijakannya di Kawasan Timur Tengah, isu kesepakatan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran dilihat bukan saja persoalan dua negara, namun dampaknya bisa meluas ke seluruh kawasan, yakni di Negara Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dan bahkan Afganistan. Berhasil dan gagalnya kesepakatan kedua negara tersebut, nantinya sangat berdampak positif atau negatif pada keadaan kawasan di Timur Tengah, efek domino berlaku dalam dinamika hubungan Negara Amerika Serikat dan Iran.

Adapun kepentingan Amerika Serikat saat ini adalah segera mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama dengan Iran. Selain itu, Kebijakan presiden Amerika Serikat di era Barack Obama terhadap Iran dimulai dengan sesuatu yang berbeda dengan para pendahulunya. Barack Obama memulai dengan upaya rekonsiliasi antara Amerika Serikat dan Iran dengan membuat langkah besar yaitu mengakui peran Amerika Serikat terhadap kejadian kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammed Mossadeq, di tengah Perang Dingin Amerika Serikat telah memainkan peran dalam menggulingkan pemerintah Iran yang dipilih secara Demokratis. Begitulah pernyataan Barack Obama dalam pidato pentingnya pada dunia muslim di Kairo. Pernyataan tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam kudeta tersebut. (<http://www.adangdaradjatun.com>).

Selain bukti tersebut diatas, Presiden Amerika Barack Obama juga menggunakan Jalur *Soft Diplomacy* terhadap nuklir Iran yaitu, Barack Obama membela habis-habisan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan Iran karena itu menurutnya adalah salah satu cara untuk menghilangkan dan mengantisipasi Negara Iran untuk membuat bom nuklir. Hal itu tampak dari pidatonya yang disampaikan di Universitas Amerika Serikat, Washington (6/8/2015) mengatakan bahwa: “Ini adalah kesepakatan yang amat bagus dan kesepakatan ini juga akan baik bagi Iran, baik bagi Amerika. Kesepakatan ini akan baik bagi kawasan yang dilanda terlalu banyak konflik. Kesepakatan ini baik bagi dunia”.

Selain itu, Obama juga menyanggah kecaman terhadap perjanjian itu, yang menurutnya adalah Kesepakatan Non-Proliferasi paling kuat yang pernah dirundingkan. Barack Obama juga mendesak rakyat Amerika untuk menelpon para anggota Kongres agar mendukung kesepakatan itu dalam voting yang akan dilaksanakan oleh anggota Kongres. (<https://www.voaindo>).

Presiden Barack Obama juga menambahkan bahwa kebijakan memberi sanksi sepihak terhadap Program Nuklir Iran jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan maka hal itu dapat menyebabkan efek yang merugikan bagi Amerika Serikat itu sendiri. Barack Obama mencontohkan kasus itu terhadap Negara China saat ini. Ketika kita harus memotong China dari sistem keuangan Amerika Serikat dan mereka berada pada posisi sebagai pembeli utama dari utang kami maka tindakan tersebut bisa memicu gangguan parah pada perekonomian kita sendiri dan cara itu dapat menimbulkan pertanyaan internasional tentang perannya “dolar” sebagai mata uang cadangan dunia. (Sindo News. Com : 6/8/2015).

Selain itu, bukti nyata bahwa Barack Obama bersikap Lunak terhadap program nuklir Iran dikarenakan, Barack Obama telah berkali-kali memperingati Israel sebagai negara yang secara nyata menentang kesepakatan nuklir Negara Iran tersebut. Obama menyebutkan sikap Negara Israel itu bisa saja dapat membahayakan kawasan Timur Tengah pada umumnya dan kepada keamanan Negara Israel khususnya.

Dari bebarapa bukti diatas, Maka kita akan melihat suatu perubahan kebijakan, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama dan George Bush W yang sangat signifikan. Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang semula dikenal sangat dominan dengan unsur-unsur militeristik dibawah kepemimpinan George W Bush, yang saat itu sudah beralih pada kepemimpinan Barack Obama. Kebijakan Politik Negera Amerika Serikat lebih mengedepankan soft diplomacy seperti membuka ruang dialektika dan kesepakatan kedamaian, maka atas dasar inilah penulis terdorong untuk menganalisis lebih jauh mengenai kebijakan Negara Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama Terhadap Pengembangan Program Nuklir Iran.

Faktor kepemimpinan menjadi hal penting untuk menentukan kearah mana sebuah negara akan mengukuhkan posisinya. Termasuk AS, sebagai negara besar dan maju banyak persoalan baik dalam dan luar negeri yang penyelesaiannya sangat bergantung pada sosok pemimpin. Dan setiap pemimpin memiliki perbedaan dalam memimpin sebuah negara. George W. Bush sebagai Presiden AS tahun 2000-2008 dan Barack Obama sebagai Presiden AS tahun 2008-2017, memiliki perbedaan-perbedaan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri masing-masing. George Walker Bush (Partai Republik) dan Barack Obama (Partai Demokrat), kedua pemimpin ini menjadikan isu nuklir iran sebagai pintu masuk dalam menjaga kepentingan AS di timur tengah beserta sekutunya dan menjaga stabilitas di kawasan timur tengah , disini

terdapat perbedaan dominan dari pola kebijakan luar negeri yang dijalankannya, Bush dengan hard diplomacy, sedangkan Obama dengan soft diplomacy. Bush sebagai aktor rasional kemudian berupaya menjalankan kebijakan secara nyata melalui tindakan-tindakan “hard diplomacy” yang ditujukan sebagai strategi dalam mencapai kepentingan nasional negaranya, stabilitas keamanan dalam negeri, regional (kewilayahan) dan internasional. Bentuk hard diplomacy yang dijalankan George W. Bush diwujudkan melalui sanksi embargo terhadap Iran dan bersifat militeristik. Sedangkan soft diplomacy yang dijalankan Obama sebagai aktor rasional antara lain melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif, kunjungan kenegaraan, forum-forum pembicaraan terhadap Iran dan negara-negara Islam yang semakin intensif dan lain-lainnya. Pada Bab IV ini akan dijelaskan alasan berbagai pertimbangan rasional yang melatarbelakangi alasan Barack Obama bersikap lunak terhadap program nuklir Iran dikarenakan beberapa faktor antara lain:

Barack Obama Ingin Menjaga Keuntungan Politik Dan Keamanan Di Kawasan Timur Tengah

Iran merupakan salah satu negara yang secara geografis berada di kawasan Timur-Tengah. Iran merupakan sebuah negara besar di kawasan dengan tradisi politik dan pola kepemimpinannya yang khas. Sejarah telah mencatat bahwa Iran kerap kali muncul sebagai aktor penting di kawasan. Dalam perkembangan paling mutakhir, Iran sedang berkonsentrasi kepada program pengembangan energi nuklir. Kebijakan pengembangan nuklir yang dilakukan Iran nyatanya telah memicu beragam persepsi di kalangan masyarakat Internasional. Bahkan negara besar seperti Amerika Serikat telah secara terbuka mengeluarkan pernyataan yang bahwasannya pengembangan nuklir oleh Iran tersebut akan digunakan untuk tindakan-tindakan penyerangan dan membangun hegemonisme Iran di Timur-Tengah.

Amerika Serikat memandang tindakan dan perilaku politik Iran senantiasa berseberangan dengan garis politik luar negeri Amerika Serikat. Bagi Iran, tindakan kontra Amerika Serikat merupakan sebuah jihad dan konsistensi politik. Sementara itu, bagi Amerika Serikat tindakan Iran secara tegas telah mengancam kepentingannya di kawasan Timur-Tengah. Presiden Amerika Serikat George W. Bush dalam suatu pidato di tahun 2002, melabel Iran sebagai bagian dari “poros kejahatan” bersama Korea Utara dan Irak. Amerika Serikat seringkali mengaitkan Iran dengan praktik radikalisme dan terorisme. Sementara Presiden Barack Obama lebih berhati-hati dalam menghadapi Iran dalam mengambil kebijakan terhadap nuklir Iran. Obama bahkan

telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir perilaku politik Iran yang dinilai berbahaya. Kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat yang besar di kawasan Timur-Tengah mengharuskan Washington untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang serba rasional dan logis terhadap Iran.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat memiliki perhatian lebih terhadap kebangkitan Iran, terutama dalam program nuklir. Kebijakan mempengaruhi Iran merupakan kebijakan yang rasional. Washington mempertimbangkan keuntungan mengenai kesepahaman Iran dan Amerika Serikat. Kepentingan nasional Amerika Serikat berupaya meredam kekuatan Iran di Timur Tengah, salah satunya memusatkan perhatian terhadap Iran. Perlakuan Obama terhadap Iran sangat mempengaruhi stabilitas di Kawasan Timur Tengah, apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dengan dalih menjaga keuntungan secara politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah.

Dari berbagai pertimbangan rasional antara untung-rugi disini Obama mengambil kebijakan berupa soft diplomacy merupakan strategi yang sangat ideal sebagai upaya pendekatan Amerika terhadap Iran agar dapat menghentikan program nuklir Iran. Pada periode pertama Obama (2009-2013), instrumen diplomasi yang diterapkan Obama menemui titik buntu, hal ini dikarenakan pada masa itu Iran dipimpin oleh Ahmadinejad yang selalu memandang negative usaha Amerika sebagai upaya untuk menjatuhkan Iran dan menolak bernegosiasi dengan Amerika.

Hal ini yang menyebabkan pada periode pertama Obama selalu mempertimbangkan berbagai macam cara supaya tercapai kesepakatan dengan Iran, bahkan komunikasi antara Iran dan Amerika. Pada periode kedua pemerintahan Obama (2013-2017) merupakan titik awal harapan perundingan nuklir Iran bagi Amerika. Dikarenakan terjadi pergantian rezim di Iran. Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai presiden baru Iran pada Juni 2013, membawa Amerika kepada lembaran baru dalam hubungan Iran-Amerika. Pasalnya terpilihnya Rouhani yang memiliki background yang lebih moderat dan terbuka terhadap pihak barat menjadi harapan baru bagi Iran. Hassan Rouhani dianggap lebih mengedepankan perundingan untuk mengeluarkan Iran dari keterpurukan embargo. Hal ini sejalan dengan pemikiran pemerintah Amerika di Era Obama yang juga sama-sama mengedepankan perundingan untuk mencari jalan keluar program nuklir Iran. Hassan Rouhani juga mendukung upaya-upaya perundingan untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Iran dan mengakhiri embargo-embargo yang dihadapi Iran selama ini. Salah

satunya ialah menyetujui untuk mengikuti perundingan antara Iran dengan negara P5+1 pada 22 november 2013 di Jenewa, Swiss yang mana pada tahun 2012 Iran dengan tegas menolak draft proposal perundingan tersebut. Perundingan P5+1 pada 2013, mulai di implementasikan sejak 20 januari 2014 dan mencapai framework pada 2 April 2015 yang lebih dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan final dari perundingan tersebut tersepakati pada 14 Juli 2015. JCPOA diprakarsai dengan tujuan untuk membendung keinginan pengembangan Program Nuklir Iran dan hanya diperuntukkan untuk kepentingan sipil saja. Dalam perjanjian ini, sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada Iran baik itu dari Amerika, Uni Eropa maupun PBB akan dikurangi sesuai dengan ketentuan perjanjian. Seiring dengan diimplementasikannya perjanjian ini, Iran mulai mengurangi jumlah uraniumnya dan sebagai gantinya Iran diperbolehkan untuk kembali mengakses aset-aset perbankan dan export minyak dan gas alamnya untuk meningkatkan perekonomian pasca embargo yang berkepanjangan.

Terjadi pertentangan terkait kesepakatan tersebut antara AS dan Iran, dimana sekutu dekat AS yakni Israel mengecam bahkan meminta kongres dan pemerintah AS untuk membatalkan kesepakatan tersebut, disini Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebagai aktor rasional dengan berbagai macam pertimbangan, tetap ingin mempertahankan kesepakatan internasional dengan Iran seraya memperingatkan Kongres bahwa membatalkan pakta damai dapat memicu perang di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Obama dalam sebuah pidato di Washington DC University tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melancarkan kampanye pada Rabu, 5 Agustus 2015, terhadap kaum Yahudi Amerika agar Republik memimpin Kongres menggagalkan kesepakatan bersejarah itu. "Ini kesepakatan yang sangat bagus," ucap Obama. "Setiap bangsa di dunia memberikan dukungan kecuali pemerintahan Israel. Saya memperhatikan ketidaksetujuan Perdana Menteri Netanyahu. Beliau sangat menentangnya. Dalam butir kesepakatan yang disetujui antara Iran dan kelompok enam negara superkuat yang dikenal dengan sebutan P5+1, negara-negara tersebut mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran setelah Negeri Mullah ini bersedia membatasi program nuklirnya. Obama juga memperingatkan bahwa menghindari pakta 14 Juli 2015 dapat memperlancar jalan Teheran guna menciptakan bom dan kredibilitas AS di mata dunia bakal hancur jika negerinya menolak kesepakatan dengan cara mencabut sanksi ekonomi melawan Iran. Dan ini merupakan sikap tegas Obama untuk tetap berkomitmen dalam membela kesepakatan yang terjadi dengan Iran.

Disisi lain rekonsiliasi antara Iran dan Amerika Serikat secara meyakinkan dapat memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dan dunia Muslim. Iran akan menjadi kurang tertarik untuk mengajak kekuatan Rusia di Timur Tengah, hal ini sangat dihindari oleh Amerika Serikat. Iran memiliki 7% dari sumber minyak dunia dan 16% gas alam. Jika Amerika Serikat tidak menguasai ladang minyak tersebut, maka Rusia dan Cina yang akan memperluas pengaruhnya. Infrastruktur minyak Iran memerlukan modernisasi dengan biaya milyaran dolar. Perusahaan Amerika Serikat secara ideal tepat untuk mendudukinya. Iran tidak akan merasa terancam oleh Amerika Serikat apabila melakukan kompromi mengenai isu nuklir. Di samping itu pengambilan kebijakan di Amerika Serikat merumuskan tujuan untuk mencegah Iran membangun persenjataan nuklir, menghalangi Iran menggunakan senjata nuklirnya. Kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mempertahankan tanah air dari musuh yang mengancam keamanan militer.

Dalam model politik aktor rasional politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, menekankan bagaimana suatu negara hegemoni akan berperilaku sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal ini dilakukan karena mereka merasa bahwa sebagai negara dengan pengaruh besar, maka akan ada kewajiban yang sama besar pula untuk dikerjakan. Inilah salah satu landasan yang menjelaskan mengapa AS di masa pemerintahan Barack Obama ingin bernegosiasi dengan Iran agar menurunkan tingkat pengayaan nuklirnya.

Tabel 4.1
Analisis Untung-Rugi Kebijakan AS Di Era Barack Obama
Terhadap Nuklir Iran

No.	UNTUNG	RUGI
-----	--------	------

1.	Bisa Menghindari Konflik atau Perang dengan Iran serta menghindari dari kejahatan Hak Asasi Manusia.	Akan Menciptakan Peperangan dengan Iran.
2.	Iran akan menyetujui perundingan kesepakatan nuklir dengan Negara P5+1 atau yang lebih dikenal dengan Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) tahun 2015	
3.	Iran Akan Mengurangi dan Menghentikan Pengembangan Program Nuklirnya.	Iran akan terus mengembangkan pengembangan program nuklirnya
4.	Bisa menjaga Kredibilitas Amerika sebagai suatu negara pemimpin diplomasi.	
5.	Dapat Menjaga Kredibilitas Amerika Serikat Sebagai Negara Super Power	
6.	Bisa Menciptakan Perdamaian Dan Menjamin Rasa Aman Bagi Sekutu AS Di Kawasan Timur Tengah	Akan Terjadi Konflik Di Kawasan Timur Tengah Antara Sekutu AS dan Iran
7.	Rekonsiliasi AS Dan Iran Dapat memperbaiki Hubungan AS dan Dunia Muslim	

Dalam kasus ini Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menyampaikan sikap menyangkut kebijakannya di Timur Tengah. Isu dialog AS-Iran dilihat bukan hanya persoalan dua negara itu, tetapi dampaknya bisa meluas ke seluruh kawasan, yakni di Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, dan bahkan Afganistan. Sukses dan gagalnya dialog AS-Iran nanti berpengaruh atas dampak positif atau negatif situasi kawasan Timur Tengah. Efek teori domino sangat berlaku dalam konteks hubungan AS-Iran itu. Adapun kepentingan taktis AS saat ini adalah segera menurunkan eskalasi konflik di Timur Tengah dan terutama dengan Iran. Sikap lunak ini diambil dengan tujuan menjaga keuntungan secara politik dan keamanan di Kawasan Timur Tengah.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri AS terhadap program nuklir Iran di masa pemerintahan Barack Obama melalui cara-cara yang

bersifat *soft diplomacy*, dari sini kita juga patut mengetahui latar belakang mengapa Obama mengambil sikap yang lunak terhadap program nuklir Iran dikarenakan AS ingin menjaga keuntungan secara politik dan keamanan di Kawasan Timur Tengah dan berbagai macam pertimbangan yang bisa merugikan AS sendiri berkaca pada invasi ke Iraq pada jaman Bush.

Dalam mengidentifikasi beberapa pilihan rasional-alternatif yang diambil oleh AS di era Barack Obama. Inilah analisis untung-rugi mengenai kebijakan AS di Era Barack Obama terhadap nuklir Iran:

Berdasarkan pertimbangan untung dan rugi di atas, maka jelaslah penulis dapat menyimpulkan bahwa Amerika Serikat di Era Barack Obama mengambil langkah Soft Diplomasi terhadap Program Nuklir Iran akan memberikan banyak keuntungan daripada kerugian.

Barack Obama Ingin Menjaga Keuntungan Ekonomi Dan Sekutunya Di Timur Tengah

Sebagai negara superpower yang memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadi Negara yang dominan, Amerika Serikat selalu mengupayakan segala cara untuk mencapai tujuannya di dalam dunia internasional baik dalam bidang ekonomi, dan dalam hal keamanan internasional. Hal ini terlihat dari setiap politik luar negeri yang di terapkan Amerika diseluruh belahan bumi dunia. Termasuk dalam kebijakan politik luar negeri yang diambil Amerika terhadap program nuklir Iran.

Program pengembangan nuklir yang di jalankan Iran membuat Amerika merasa terancam dengan kemampuan Iran dalam mengembangkan nuklir. Maka dalam tahap ini yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah Amerika adalah untuk menghentikan dan membatasi Iran dalam pengembangan program nuklirnya, dikarenakan AS ingin mengamankan kepentingan keuntungan secara ekonomi dan juga sekutunya di Kawasan Timur Tengah.

Sebenarnya kepentingan yang mendasari sikap serta ambisi AS tersebut adalah untuk menguasai sumber minyak dunia. Iran merupakan negara Timur Tengah penghasil minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Iran adalah salah satu negara anggota OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) yang mempunyai potensi minyak dan gas bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data Oil and Gas Journal, 1 Januari 2006, Iran memiliki cadangan minyak sebesar 132,5 miliar barrel atau 11,7 persen cadangan minyak dunia. Sementara itu, cadangan gas Iran mencapai sekitar 27,5 miliar kubik, atau setara dengan 15,1 persen dari cadangan gas

dunia. Cadangan minyak Iran terus meningkat, seiring ditemukannya sumber-sumber minyak baru. Pertengahan Juli 2006 lalu, Iran berhasil menemukan tiga ladang minyak baru yang mengandung lebih dari 38 miliar barrel minyak. Di ladang minyak Koh-Mond diperkirakan terdapat 6,630 miliar barrel minyak. Sementara di ladang minyak Zageh terdapat sekitar 1,300 miliar barrel minyak dan di ladang minyak Firdows terdapat 30,600 miliar barrel minyak.

Di tengah krisis minyak seperti sekarang ini, bagi Amerika Serikat menjadi *dream comes true* dengan menguasai Iran. Jika hal itu bisa tercapai, berarti Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara penguasa sumber minyak terbesar dunia dan bisa sepenuhnya mengatur harga minyak di pasar internasional dengan sekehendak hatinya. Ketergantungan AS terhadap impor minyak semakin tinggi karena meningkatnya permintaan dalam negeri, sementara produksi domestiknya justru menurun. AS mengalami puncak produksi minyak pada tahun 1970-an dengan jumlah 9,64 juta barrel per hari. Namun setelah itu menurun hingga sekarang tinggal 40 persen. Saat ini konsumsi minyak AS mencapai 20 juta barrel per hari, dimana 55 persennya harus diimpor. Untuk kebutuhan impor tersebut AS setiap hari mengeluarkan 390 juta dollar AS, setengahnya dibayarkan ke negara-negara anggota OPEC dan seperempatnya untuk negara-negara di Teluk Persia.

Kepentingan AS terhadap minyak di Timur Tengah nampaknya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap politik luar negerinya. Sudah menjadi aksioma kebijakan luar negeri AS bahwa negara adidaya itu harus mengontrol sumber energi Timteng beserta sekutunya, kendati minyak Timteng sendiri hanya menyumbang 10 persen dari impor minyak AS. Kebijakan AS terhadap Timteng akan tetap sama sekalipun AS tidak menggunakan minyak dari Timteng. Dengan menguasai Timteng yang mempunyai cadangan minyak terbesar didunia, AS sekaligus mempunyai kekuatan veto dan bisa mengendalikan para pesaing industrinya dalam menguasai perekonomian dunia. Selama ini Amerika menempuh segala cara untuk bisa mempertahankan pengaruh dan kepentingannya, terutama menyangkut minyak di timur tengah.

Setiap perubahan kebijakan luar negeri AS, setiap intervensi militer yang dilakukan AS, dan setiap operasi gelap badan intelijen AS (CIA) di Timteng tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguasai jalur produksi dan perdagangan minyak dari Timteng dan beserta sekutunya. Dalam hal ini AS sendiri ingin menjalin kerjasama dengan Iran dari berbagai sektor politik dan ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang bersifat lunak, dikarenakan dengan bersikap lunak AS sendiri bisa membuka ruang dialog serta kemungkinan terjadi kesepakatan antara AS dan Iran,

tapi sebaliknya jikalau AS menekan dengan menggunakan pendekatan hard ini akan bisa menyebabkan terjadinya ancaman terhadap AS dan sekutunya di Timur Tengah, maka ini akan merugikan AS sendiri. tetapi dgn sikap lunak kerjasama menjadi lebih bisa diwujudkan dan ini pilihan yang sangat rasional bagi Obama dalam menjaga kepentingan AS dan sekutu di Timur Tengah.

Inilah beberapa pertimbangan rasional untung-rugi mengenai kebijakan Barack Obama dalam melihat situasi di Timur Tengah:

Tabel 4.2
Pertimbangan Rasional Untung-Rugi Mengenai Kebijakan Barack Obama Dalam Melihat Situasi Di Timur Tengah

No.	UNTUNG	RUGI
1.	Bisa bekerjasama dalam (Politik, Ekonomi, dll) serta membuka hubungan yang lebih Produktif dengan Iran	Akan memberi ancaman terhadap keamanan AS dan sekutunya di Timur Tengah
2.	Amerika menjadi satu-satunya Negara penguasa sumber minyak terbesar dunia dan bisa sepenuhnya mengatur harga minyak di pasar Internasional.	Semakin besar ketergantungan AS terhadap impor minyak.
3.	Iran Akan mengurangi pengembangan program nuklirnya	
4.	Bisa menjaga hegemoni AS sebagai Negara super power.	

Berdasarkan pertimbangan untung dan rugi di atas, maka jelaslah kita dapat menyimpulkan bahwa Amerika Serikat di Era Barack Obama mengambil bersikap lunak terhadap Program Nuklir Iran akan memberikan banyak keuntungan daripada kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengapa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran di masa pemerintahan Barack Obama bersikap lunak, hal ini didasarkan 2 hal, yakni, pertama, Barack Obama ingin menjaga keuntungan politik dan keamanan di kawasan timur tengah. Kedua, Barack Obama ingin menjaga keuntungan ekonomi dan sekutunya di Timur Tengah.

Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Iran dimulai pada sekitar pertengahan akhir tahun 1800-an. Sebelum terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, hubungan AS-Iran dan bahkan Iran dengan Inggris serta beberapa negara Barat lainnya merupakan hubungan yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan Iran merupakan “boneka” kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Pada saat itu Iran merupakan negara yang kuat secara ekonomi, politik, dan militer yang semuanya akibat dukungan AS dan negara-negara Barat.

Namun, sejak revolusi para mullah dibawah pimpinan Ayatullah Khoemeni pada tahun 1979 yang menumbangkan sekutu Amerika, Reza Shah Pahlevi, Iran telah menjadi target Amerika. Pendudukan Kedutaan Amerika di Teheran oleh para aktivis mahasiswa pada 4 November 1979 yang diikuti penyanderaan 52 orang diplomatnya selama 444 hari, merupakan peristiwa yang memalukan bagi Amerika dan menjadi alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik pada 7 April 1980. Selanjutnya, dengan dalih HAM dan demokrasi Amerika menjatuhkan berbagai embargo, operasi intelijen dan operasi militer.

Kebijakan nuklir Iran dalam beberapa tahun terakhir adalah salah satu pemicu tekanan Barat melalui Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Republik Islam tersebut. Mereka menilai bahwa tujuan Iran untuk mengadakan pengayaan uranium tidak lain adalah demi kepentingan militernya agar mampu hadir sebagai kekuatan dominan di kawasan, menandingi salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat, Israel. Iran sendiri secara resmi berulang kali menyatakan sanggahannya terhadap tuduhan itu dan mengatakan bahwa program pengayaan uranium mereka betul-betul demi tujuan damai, yakni membangun pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membantu memenuhi kebutuhan energi nasionalnya di masa depan.

Pada era sebelum terjadi Perang Dunia I yakni pada 1916, Amerika Serikat memperlunak politik luar negerinya yang bersifat ekspansionis. Bahkan ketika Perang Dunia I terjadi AS menyatakan tidak ingin terlibat. Akan tetapi, secara perlahan ketika militer angkatan laut AS diganggu oleh Jerman, perilaku agresor militer AS mulai terlihat kembali. Setelah kapal dagang milik AS ditenggelamkan oleh Jerman pada 1917, AS menyatakan perang terbuka terhadap Jerman pada Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Setelah Perang Dunia I, AS muncul sebagai pemenang dan mulai terlibat dalam upaya perdamaian dunia. Misalnya, AS dibawah Presiden Woodrow Wilson mempelopori terbentuknya LBB (Liga Bangsa-Bangsa) pada tanggal 10 Januari 1920 dengan tujuan untuk terwujudnya perdamaian dunia dan rekonstruksi kesejahteraan global pasca Perang Dunia I (Hendrajit et al. 2010, h. 106). Akan tetapi,

keberadaan LBB ini tidak bertahan lama, dikarenakan dasar politik luar negeri AS yang ekspansionis dan sistem internasional yang anarkis sehingga menyebabkan meletusnya kemelut Perang Dunia II pada 1939.

Memasuki Perang Dunia II, Amerika Serikat semakin menjadi negara yang diperhitungkan di dunia (Hendrajit 2010, h. 106). AS yang terlibat langsung dalam Perang Dunia II menganggap bahwa keterlibatannya adalah karena AS sebagai polisi dunia berhak untuk turut serta menjaga dan membantu para sekutunya yakni Inggris, Polandia dan Perancis dari serangan militer Jerman dan Italia. Terlebih pelabuhan militer AS Pearl Harbor ikut diserang oleh pasukan Jepang. Keadaan ini semakin memperkeruh keadaan internasional pada waktu terjadinya Perang Dunia II. Kemudian, kelompok sekutu yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II yang dipimpin oleh AS melebarkan dominasinya untuk melanjutkan kiprahnya di dunia. AS bersama negara-negara sekutu lainnya yakni Inggris, Perancis dan Polandia kembali membawa dunia ke tatanan perdamaian.

Kebijakan politik Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya setelah Perang Dunia II, merupakan sebuah fenomena politik baru dalam politik global yakni kerjasama dan integrasi negara dalam suatu kawasan dalam skala kontinental. Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (David Held. 2000, Regulation Globalization, international sociology, 394).

Di bawah pemerintahan Bush, strategi yang diterapkan adalah diplomasi koersif. Diplomasi koersif adalah negosiasi yang memerlukan sanksi agar aktor yang dikehendaki mau mengerjakan apa yang diperintahkan negara 'coercer'. Perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan diplomasi koersif adalah stick and carrot yaitu, apabila negara yang dituju menurut maka mereka boleh mendapatkan wortel. Namun jika sebaliknya, maka negara tersebut akan dipukul dengan tongkat. Strategi seperti inilah yang digunakan oleh Bush dalam mencoba menekan Iran. Akan tetapi, sebelum jenis diplomasi ini diterapkan, pemerintahan Bush memulai langkah dengan mengkonstruksi pola pikir dunia internasional akan bahaya yang dibawa oleh Iran. Konstruksi ini terutama dituju untuk negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Perancis,

dan Jerman. Inilah yang benar-benar terjadi bahwa AS berhasil meyakinkan ketiga negara tersebut. Pada bulan Oktober 2003, negara besar Uni Eropa berhasil membuat Iran setuju untuk mengikuti protokol IAEA (International Atomic Energy Agency) agar menunda pengayaan (Hadley, 2014).

Di masa pemerintahan Barack Obama terjadi perbedaan sikap dan kebijakan dari pemerintahan Bush yang didominasi oleh *hard power*. Pasalnya, Obama berkaca dari pengalaman presiden sebelumnya yakni tak lain adalah Bush yang dinilai gagal dalam membawa Iran ke meja perundingan untuk berdiplomasi. Walaupun sempat menunda pengayaan uranium pada tahun 2003, Iran kembali melanjutkan proyeknya pada tahun 2006. Ini menjadi pertimbangan pemerintahan Obama, sehingga AS memutuskan untuk fokus pada strategi *soft power* terhadap Iran. Obama lebih memilih menggunakan jalur yakni, perundingan, berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, ini merupakan taktik dimana AS di bawah kepemimpinan Barack Obama memilih pendekatan-pendekatan diplomatis guna mengatasi persoalan Amerika dalam menjalin hubungan yang lebih baik dengan Iran, serta memulihkan citra AS dari kepemimpinan Bush sebelumnya. Dari pendekatan militeristik ke pendekatan yang lunak.

Bahkan Obama membuat kebijakan program yang bernama *Virtual Embassy* agar memberikan kesempatan kepada generasi muda Iran untuk belajar di AS. Hal ini disampaikan dan dipastikan oleh sekretaris negara, Clinton dalam wawancaranya dengan Voice Of America (VOA). Dari sini kita dapat melihat bahwa walaupun sebelumnya Iran dianggap sebagai musuh, malah sebaliknya digandeng oleh AS di bawah pemerintahan Obama secara internal. Maksudnya, AS berusaha untuk memenangkan hati rakyat Iran, dan secara tidak langsung mengkonstruksi pola pikir yang positif terhadap AS melalui pendidikan. Usaha ini sangat penting sebagai langkah-langkah dalam mencapai kepentingan nasional negara adidaya ini.

Dari penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran di masa pemerintahan Barack Obama melalui cara-cara yang bersifat *soft power*, dari sini kita juga patut mengetahui latar belakang mengapa Obama mengambil sikap yang lunak terhadap program nuklir Iran dikarenakan AS ingin menjaga keuntungan politik, keamanan di Kawasan Timur Tengah dan ingin menjaga keuntungan ekonomi dan sekutunya di Timur Tengah.

Kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak di Timur Tengah nampaknya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap politik luar negerinya. Sudah menjadi aksioma kebijakan

luar negeri AS bahwa negara adidaya itu harus mengontrol sumber energi Timteng kendati minyak Timteng sendiri hanya menyumbang 10 persen dari impor minyak AS. Kebijakan AS terhadap Timteng akan tetap sama sekalipun AS tidak menggunakan minyak dari Timteng. Dengan menguasai Timteng yang mempunyai cadangan minyak terbesar didunia, AS sekaligus mempunyai kekuatan veto dan bisa mengendalikan para pesaing industrinya dalam menguasai perekonomian dunia. Selama ini Amerika menempuh segala cara untuk bisa mempertahankan pengaruh dan kepentingannya, terutama menyangkut minyak di timur tengah.

Setiap perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, setiap intervensi militer yang dilakukan AS, dan setiap operasi gelap badan intelijen AS (CIA) di Timur Tengah tujuannya hanya satu, yaitu untuk menguasai jalur produksi dan perdagangan minyak. Dalam model aktor rasional politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, menekankan bagaimana suatu negara hegemoni akan berperilaku sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas kawasan. Hal ini dilakukan karena mereka merasa bahwa sebagai negara dengan pengaruh besar, maka akan ada kewajiban yang sama besar pula untuk dikerjakan. Inilah salah satu landasan yang menjelaskan mengapa AS di masa pemerintahan Barack Obama ingin bernegosiasi dengan Iran agar menurunkan tingkat pengayaan nuklirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, Abdullah. (1989), *Garis Besar Pemerintah Amerika Serikat*, USIS, Jakarta.
- Anggreni, Hosianna R. 2009, *Sikap Kritis Iran Terhadap Resolusi DK-PBB*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Ansari, Ali M 2008, *Supremasi Iran “Poros Setan Atau Superpower Baru”*, translate. S Wardi, Zahra Publishing House, Jakarta.
- Anwar, Dewi Fortuna 2003, „Tatanan Dunia Baru di Bawah Hegemoni Amerika Serikat“, *Jurnal Demokrasi dan HAM* Vol. 3, No. 2, Mei-September 2003, h. 7-28.
- Burchill, Scott & Andrew Linklater 2009, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, translate. M Sobirin, Nusa Media, Bandung.
- Cipto, Bambang 2004, *Dinamika Politik Iran “Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cook, A. H., and Roshandel, J. (2009) *The United States and Iran*. New York: Palgrave Macmillan.
- Creswell, John W 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, SAGE Publications, Inc, Thousand Oaks.
- David, S. R. (2006) *American Foreign Policy towards the Middle East: A Necessary Change?*, *Israel Affairs*, 12, pp. 614-641. doi: 10.1080/13537120600889886
- Djafar, Zainuddin 1996, *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- _____, _____ 2006, *Iran’s Nuclear Case: Its Implication, US Stance and The Policy of Indonesia*, *The Indonesian Quarterly*, Vol. 34, No. 1, h. 10-16.
- Deudney, D., and Meiser, J. (2012) *American exceptionalism*. Dalam M. Cox and D. Stokes (Eds.). *US Foreign Policy (Second Edition)* (pp. 21-39). New York: Oxford University Press.
- Dumbrell, J. (2012) *America in the 1990s: searching for purpose*. Dalam M. Cox and D. Stokes (Eds.). *US Foreign Policy (Second Edition)* (pp. 82-96). New York: Oxford University Press.
- El-Gogary, Adel 2007, *Ahmadinejad: The Nuclear Savior of Tehran “Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis”*, translate. T Kuwais, Pustaka Iman, Depok.
- Frankel, Joseph 1988, *International Relations in a Changing World Fourth Edition*, New York: Oxford University Press.
- Glassman, Jim 2005, „The New Imperialism? On continuity and Change in US Foreign Policy“, *Environment and Planning A*, Department of Geography University of British Columbia, Vancouver, Canada, Vol. 37, h. 1527-1544.

- Hamzah, Alfian & Musa Kazhim 2007, Perang Dunia III di Pelupuk Mata Iran Skenario Penghabisan, Cahaya Insan Suci, Jakarta.
- Hendrajit, dkk 2010, Tangan-Tangan Amerika “Operasi Siluman AS di Pelbagai Belahan Dunia”, Global Future Institute, Jakarta.
- Heriyanto, Yayak 2007, Politik Luar Negeri Iran Dalam Upaya Menjaga Kepentingan Nasional. Studi Kasus: Pengembangan Teknologi Nuklir Iran Dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi Iran, Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Holsti, K. J 1992. International Politics, A Framework for Analysis, 6th, Prentice Hall, Inc, New Jersey.
- Hutabarat Leonard, Analisa kebijakan luar negeri dalam studi hubungan internasional.
- LaFeber, W. (2012) The US rise to world power, 1776-1945. Dalam M. Cox and D. Stokes (Eds.). US Foreign Policy (Second Edition) (pp. 43-58). New York: Oxford University Press.
- Saull, R. (2012) American foreign policy during the Cold War. Dalam M. Cox and D. Stokes (Eds.). US Foreign Policy (Second Edition) (pp. 59-81). New York: Oxford University Press.
- Mas’oed, Mohtar. 1990. Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES.
- Meiertöns, H. (2010) The Doctrines of US Security Policy: An Evaluation under International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oren, Ido. 2012. Why has the United States not Bombed Iran? The Domestic Politics of America’s Response to Iran’s Nuclear Project. London:Routledge.

Internet:

<http://www.antaraneews.com>, akses tanggal 13 Mei 2017, 14 & 16 Mei 2017

<http://www.hileudnews.com>, akses tanggal 15 mei 2017

<http://www.antaraneews.com/berita/517038/41-senator-as-janji-dukung-kesepakatan-nuklir-iran>, akses tanggal 21 mei 2018

<https://www.voaindonesia.com/a/obama-tentang-perjanjian-nuklir-iran-pilih-diplomasi-daripada-perang/2903729.html>, akses tanggal 21 mei 2018

<https://www.matamatapolitik.com/perbedaan-kontras-dua-presiden-amerika-dua-demonstrasi-iran/>, akses pada 21 mei 2018

https://www.academia.edu/30377649/Polemik_Perbandingan_Strategi_Pemerintahan_Bush_dan_Obama_dalam_Menanggapi_Pengayaan_Senjata_Nuklir_oleh_Iran.docx?auto=download, akses pada 27 agustus 2018

<http://tiffanysetyopratiwi.blogspot.com/2016/03/gaya-kepemimpinan-bush-dan-obama.html>, akses pada 27 agustus 2018

<http://azmistevanov.blogspot.com/2015/01/pencitraan-politik-pemerintah-amerika.html>, akses pada 29 agustus 2018

<https://annisamardiana.wordpress.com/2012/11/10/pergeseran-arrah-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kepemimpinan-george-w-bush-vs-kepemimpinan-barack-obama/>, akses pada 29 agustus 2018

<https://dunia.tempo.co/read/689734/hindari-perang-obama-ingin-tetap-merangkul-iran/full&view=ok>

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/03/15/m0wqj3-obamacameron-ingin-berunding-dengan-iran-bukan-aksi-militer>